

**PENGELOLAAN ANGGARAN PADA PROGRAM
PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KEWILAYAHAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA
PALEMBANG TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**AHMAD ROBBI DARMAWAN
07111001116**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA, OGAN ILIR
JULI 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENGELOLAAN ANGGARAN PADA PROGRAM
PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN
KETERTIBAN KEWILAYAHAN DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA PALEMBANG TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh :

**AHMAD ROBBI DARMAWAN
07111001116**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 17 Juli 2018

Pembimbing I

**Drs. Mardianto, M,Si
NIP.196211251989121001**



Pembimbing II

**Ermanovida, S.Sos, M,Si
NIP.196911191998032001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Pengelolaan Anggaran Pada Program Pengembangan Strategi Keamanan Dan Ketertiban Kewilayahan Di Kepolisian Resort Kota Palembang Tahun 2014*” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 27 Juli 2018.

Palembang, 27 Juli 2018

Ketua :

Drs. Mardianto, M.Si.

NIP. 196211251989121001

Anggota:

1. Ermanovida, S.Sos, M.Si.

NIP. 196911191998032001

2. Drs. Gatot Budiarto, M.S.

NIP. 195806091984031002

3. Drs. H. Joko Siswanto, M.Si.

NIP. 195706051985031003

Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M.Si
NIP. 198108272009121002

Motto & Persembahan

Motto :

“Scars don't heal when you keep cutting”

Asking Alexandria

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orangtuaku tercinta*
- ❖ Saudaraku sumber motivasiku*
- ❖ Uwik penyemangatku*
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku*

Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terimakasih atas karunia Allah SWT karena berkat rahmat dan izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "*Pengelolaan Anggaran pada Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan di Kepolisian Resort Kota Palembang Tahun 2014*".

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Bapak M.Ridwan dan Ibu Daipah atas segala pengorbanan baik moril maupun materil, semangat, motivasi, bimbingan dan kasih sayang. Saudaraku Muhammad Risky Kurniawan yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini. Penulis juga berterimakasih kepada berbagai pihak yang selama ini membantu dalam berbagai hal selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan dalam berbagai urusan perkuliahan selama ini.yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan dalam berbagai urusan perkuliahan selama ini.
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M,Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Ermanovida S.Sos, M,Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan administrasi terutama urusan yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Ermanovida S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, inspirasi, saran dan masukan serta nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.S dan Bapak Drs H. Joko Siswanto, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu untuk membahas dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM selaku Dosen Pembimbing Akademik telah membimbing penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini.
6. Bapak Komisaris Besar Polisi Wahyu Bintono Hari Bawono S.IK, SH, MH selaku Kapolresta Palembang dan seluruh pegawai Polresta Palembang yang telah memberikan izin penelitian serta bimbingan dan bantuan yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas bantuan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Dwi Tiara Sari sebagai penyemangat bagi penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan, motivasi serta bantuan.
9. Teman terbaik semasa kuliah, Galuh, Rejak, Arinza, Kaka, Erik, Firman, Apriga, Alvin, John, Oci, Deperi, Leo, Sadam terimakasih atas dukungan dan bantuan selama ini, salam BOCOR Crew.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah yang lebih baik sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Juli 2018

Penulis,

Ahmad Robbi Darmawan

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran pada Program Pengembangan Strategi Keamanan Dan Ketertiban Kewilayahan di Kepolisian Resort kota Palembang. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan anggaran pada program tersebut. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pengelolaan anggaran pada Program Pengembangan Strategi Keamanan Dan Ketertiban Kewilayahan di Kepolisian Resort kota Palembang tahun 2014 belum mencapai target dan tujuan secara optimal. Hal ini dikarenakan berdasarkan data dan informasi yang didapatkan bahwa realisasi anggaran pada program hanya 97%. Selain itu, dalam penetapan rencana kegiatan, target yang ditentukan tidak sebanding dengan anggaran yang diajukan. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi pada beberapa program, kurangnya kesiapan menghadapi issue-isue yang akan muncul pada tahun berikutnya, kurangnya pengawasan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian Negara pada program kegiatan yang dilaksanakan.

Kata kunci: Pengelolaan Anggaran, Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan, Satuan Intelejen Keamanan, Perencanaan dan Penanggaran, Pelaksanaan Keuangan, Pertanggungjawaban Keuangan.

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos, M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, Juli 2018

Ketua Jurusan Administrasi Negara
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This thesis is aimed to analyze the budget management of the Regional Order and Security Strategy Development Program at the Palembang City Police Resort. Moreover, this thesis is also aimed to identify the factors that influence the budget management of the program. The type of research used in this thesis is descriptive research, which uses qualitative research methods. The type of data used is primary data and secondary data, while data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. This study uses budget management theory. The result showed that the analysis of the budget management of the Regional Order and Security Strategy Development Program at the Palembang City Police Resort in 2014 had not yet reached its targets and objectives optimally. This is because based on the data and information obtained that the realization of the budget of the program is only 97%. In addition, in determining the activity plan, the target set is not proportional to the proposed budget. The constraints faced were the lack of socialization in several programs, and the lack of supervision held by the state Police Department in the activities program that carried out.

Keyword : Budget management, Regional Order and Security Strategy Development Program, Security Intelligence Unit, Planning and Budgeting, Financial Implementation, Financial Accountability.

Advisor I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Advisor II



Ermanovida, S.Sos, M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, July 2018
Head of Departement Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Penganggaran program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban mengalami kenaikan secara kontinu dan signifikan.....	11
2. Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilyahan belum efektif	14
3. Metode pelaksanaan dilakukan secara swakelola berpotensi adanya pemborosan dan tidak tepat guna dalam penggunaan anggaran.	17
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
1. Manfaat Teoritis	19
2. Manfaat Praktis.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Landasan Teori.....	20
1. Pengelolaan Keuangan Negara.....	20
2. Teori Pengelolaan Anggaran	25
3. Teori Pengelolaan Anggaran yang Digunakan.....	34
B. Kerangka Teori.....	36
C. Penelitian Terdahulu.....	38
D. Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Desain Penelitian	44
B. Definisi Konsep.....	45
C. Fokus Penelitian	46
D. Unit Analisis.....	47
E. Informan Penelitian	48

F.	Bentuk Data.....	48
G.	Jenis Data dan Sumber Data.....	49
H.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
I.	Keabsahan Data Penelitian.....	50
J.	Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		55
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
1.	Kepolisian Resort Kota (Polresta) Palembang.....	55
2.	Kedudukan dan Tugas, Pokok dan Fungsi Polresta Palembang.....	56
3.	Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Polresta Palembang.....	58
4.	Struktur Organisasi Polresta Palembang.....	64
5.	Anggaran Belanja Kepolisian Resort Kota Palembang.....	64
6.	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilyahan yang dilaksanakan oleh Satuan Intelkam Polresta Palembang.....	68
7.	Mekanisme Pelaksanaan Anggaran pada Program di Polresta Palembang.....	70
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		71
A.	Hasil dan Pembahasan.....	71
1.	Perencanaan dan Penganggaran.....	72
2.	Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan.....	91
3.	Pertanggungjawaban Keuangan.....	102
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		108
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....		111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PAGU DIPA Program-program Kegiatan pada Kepolisian Resort Kota Palembang Beserta Realisasi pada Tahun 2012-2014.....	10
Tabel 1.2 Data Anggaran Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan Polresta Palembang.....	13
Tabel 1.3 Data Realisasi Anggaran Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan pada tahun 2012-2014.....	15
Tabel 2.1 <i>Review</i> Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	47
Tabel 5.1 Matriks kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	77
Tabel 5.2 Matriks kegiatan pendataan dan pengawasan tindak pidana.....	77
Tabel 5.3 Matriks kegiatan membentuk dan pembinaan jaringan informasi Polres.....	78
Tabel 5.4 Matriks kegiatan membentuk dan pembinaan informasi Polsek.....	79
Tabel 5.5 Matriks kegiatan deteksi kegiatan masyarakat (Polres)	79
Tabel 5.6 Matriks kegiatan Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek)	80
Tabel 5.7 Matriks kegiatan Pembinaan Keamanan	80
Tabel 5.8 Matriks kegiatan Membentuk dan Pembinaan Jaringan Informasi Polres/PNBP.....	81
Tabel 5.9 Matriks kegiatan Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polres/PNBP).....	81
Tabel 5.10 Matriks kegiatan Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek/PNBP).....	82
Tabel 5.11 Data Realisasi Anggaran pada Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan Kepolisian Resort Kota Palembang.....	92
Tabel 5.12 Data Penerbitan SKCK tahun 2012 – 2014.....	100
Tabel 5.13 Data penerbitan Surat Izin Keramaian dan Unjuk Rasa.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir Pengelolaan Anggaran pada Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan di Kepolisian Resort Kota Palembang Tahun 2014.....	42
Gambar 2 Struktur Organisasi Polresta Palembang	59
Gambar 3 Rapat Mengenai Pembahasan Rencana Kegiatan Tahunan yang Dipimpin Oleh Kapolresta Palembang	90
Gambar 4 Rapat Pembahasan kegiatan Deteksi Kegiatan Masyarakat demi membantu elemen Kepolisian lainnya dalam menghadapi Pilpres Tahun 2014.....	105
Gambar 5 Rapat Pembahasan Penutupan Anggaran Tahun 2014.....	106

DAFTAR LAMPIRAN

1	: Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi.....	113
2	: Lembar Bimbingan Proposal dengan Dosen Pembimbing I.....	114
3	: Lembar Bimbingan Proposal dengan Dosen Pembimbing II.....	115
4	: Lembar Bimbingan Revisi Seminar Dengan Penguji I.....	116
5	: Lembar Bimbingan Revisi Seminar Dengan Penguji II.....	117
6	: Lembar Bimbingan Revisi Seminar Dengan Pembimbing I.....	118
7	: Lembar Bimbingan Revisi Seminar Dengan Pembimbing II.....	119
8	: Lembar Bimbingan Skripsi dengan Dosen Pembimbing I.....	120
9	: Lembar Bimbingan Skripsi dengan Dosen Pembimbing II.....	122
10	: Surat Izin Penelitian.....	124
11	: Laporan Realisasi Anggaran Polresta Palembang Tahun 2012.....	125
12	: Laporan Realisasi Anggaran Polresta Palembang Tahun 2013.....	129
13	: Laporan Realisasi Anggaran Polresta Palembang Tahun 2014.....	132
14	: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.....	136
15	: Jaringan Informasi Satuan Intelkam Polresta Palembang.....	140
16	: Perwabku Kegiatan Intelejen Satuan Intelkam Polresta Palembang.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan memiliki pengertian yang universal atau sering disebut dengan *security*. Pada awal mulanya konsep keamanan (*security*) hanya menyangkut pengertian yang berkaitan dengan keamanan suatu Negara. Komisi Konstitusi (2004) dengan mengutip Patrick J. Garrity mengemukakan bahwa pengertian “security” : *“closely tied to a state’s defense of sovereign interest by military means. At its most fundamental level, the term security has meant the effort to protect a population and territory against organized force while advancing state interest through competitive behavior”*.

Keamanan berasal dari kata pokok ”aman” yang berarti bebas, terlindung dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sedangkan ”keamanan memiliki arti “suasana aman” ketenteraman, ketenangan (Peter Salim, 2002).

Menurut pandangan konvensional, konsep keamanan nasional lebih ditekankan pada kemampuan pemerintah untuk melindungi integritas teritorial suatu negara dari ancaman yang datang dari luar dan maupun dari dalam negara tersebut (IDSPS, 2008). Keamanan nasional merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Terwujudnya negara yang aman dan damai merupakan upaya menciptakan suatu kondisi yang bebas dari bahaya dan segala bentuk gangguan atau ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Rasa aman dan damai tercermin dari keadaan tenteram,

tidak ada rasa takut ataupun khawatir, tidak terjadi konflik antar individu atau kelompok, tidak ada kerusuhan, serta hidup rukun dalam suatu sistem hukum.

Dalam sudut pandang lebih luas Darmono dkk. (2010: 9) mengemukakan pengertian keamanan nasional sebagai: "Kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Keamanan nasional juga dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi". Konsep tersebut menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa: "Keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal" (Darmono dkk., 2010: 50). Agar kondisi tersebut dapat terwujud, harus ada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan.

Aktivitas ini merupakan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai fungsi keamanan nasional. Dalam hal ini, keamanan nasional dapat dipahami sebagai kondisi dan juga fungsi keamanan. Keamanan nasional sebagai fungsi bertujuan memberikan perlindungan keamanan yang perlindungan keamanan negara, keamanan publik dan keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan yang dipengaruhi faktor eksternal atau internal. Keamanan nasional sebagai kondisi merujuk pada situasi yang bebas dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan.

Indonesian Working Group on Security Sector Reform mengemukakan pemahaman tentang keamanan nasional yang mencakup aspek keamanan manusia (*human security*) dan kedaulatan negara (*sovereignty*) (Propatria, 2003). Talbot dan Jakeman (2009: 64) menjelaskan bahwa konsep keamanan manusia sekarang ini banyak digunakan untuk menggambarkan ancaman kompleks yang terkait dengan perang sipil, pembunuhan atau pembantaian, serta intimidasi terhadap penduduk. Sementara itu, keamanan nasional lebih berfokus pada pertahanan negara dari berbagai bentuk ancaman eksternal, keamanan manusia adalah upaya melindungi individu dan masyarakat dari berbagai bentuk kekejaman politik. Implementasi dua dimensi keamanan nasional tersebut dapat dilakukan melalui penegakan hukum dan penegakan kedaulatan. Menurut IDSPS (2008) keamanan nasional merupakan perwujudan dari konsep keamanan menyeluruh yang memiliki empat dimensi yaitu pertahanan negara, stabilitas dalam negeri, ketertiban publik, dan keamanan insani. Keempat dimensi tersebut mendefinisikan keamanan nasional sebagai upaya politik pemerintah yang bertujuan menciptakan kondisi aman bagi terselenggaranya pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi aman merupakan prasarat meraih untuk kepentingan nasional yang terbebas dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Kemanan nasional dalam dimensi ketertiban publik dan keamanan insani membutuhkan instrumen tersendiri. Suparlan (2004) menjelaskan bahwa untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya pranata, aturan, dan norma; sedangkan institusi yang dapat bertindak sebagai ‘wasit’ yang adil salah satunya adalah polisi. Secara universal, peran polisi dalam masyarakat adalah sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), sebagai pemelihara ketertiban (*order maintenance*)

yang di dalamnya mengandung pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*) (Samego, 2008: 6).

Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat adalah pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab kusus memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun pencegahan kejahatan agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar, 2004: 1). Kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan adanya rasa aman, tertib dan tentram. Kegiatan-kegiatan polisi berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai gangguan yang merugikan anggota masyarakat tersebut (Suparlan: 2004).

Keberadaan polisi di setiap negara memiliki sifat unik dengan karakteristik sendiri berbeda dengan negara lain, di samping hal-hal yang sifatnya universal. Dalam prakteknya di Indonesia, Ketetapan MPR No.VII/ MPR/2000 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sejalan dengan itu kepolisian di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut menjelaskan bahwa: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dilandasi oleh peran sebagai pemelihara keamanan, Polri memiliki tugas-tugas yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif sesuai dengan fungsi polisi dalam konteks universal (Djamin, 2007: 54). Tugas pre-emptif diarahkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor korelatif kriminogen yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Tugas preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat. Tugas represif diarahkan pada upaya penindakan hukum jika gangguan keamanan dan ketertiban tersebut terlanjur terjadi untuk mengembalikan pada situasi yang kondusif.

Berdasarkan Undang-Undang No.02 Tahun 2002 ayat 1, pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dikatakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian memiliki tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yaitu perkembangan kehidupan masyarakat khususnya Kota Palembang secara umum, baik di bidang Ideologi, Politik, Sosial, Ekonomi maupun Budaya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi kantibmas yang terjadi, serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui beberapa aspek yang berpotensi menimbulkan kerawanan antara lain :

1. Posisi dan letak Kota Palembang yang strategis sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan dan daerah penghubung menuju kabupaten lain di wilayah

Provinsi Sumatera yang dapat menimbulkan kerawanan akan tindakan kriminal dan anarkis.

2. Sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang sangat rentan terjadinya unjuk rasa anarkis yang berpotensi menimbulkan gangguan situasi kantibmas, dikarenakan banyaknya aksi unjukrasa dari beberapa masyarakat / LSM diwilayah kabupaten yang ingin menyuarakan aspirasinya di wilayah kota Palembang.
3. Jumlah penduduk yang cukup besar dan luas nya lahan di kota Palembang menimbulkan banyaknya konflik antar golongan maupun sampai ke permasalahan sengketa lahan yang harus dijaga agar tetap kondusif.
4. Sebagai daerah pendidikan dan perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan, yang sebagian besar berada di Kota Palembang dapat menimbulkan kerawanan unjuk rasa mahasiswa yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta isu – isu nasional/ internasional lainnya.
5. Adanya beberapa objek vital yang berpotensi menyebabkan terjadinya sabotase atau tindak pencurian.
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Palembang sehingga apabila menghadapi persoalan keamanan dan ketertiban sering mengambil jalan pintas berupa tindakan main hakim sendiri.
7. Agenda demokrasi, dimana wilayah Kota Palembang sering menjadi tempat untuk sarana agenda demokrasi dikala mendekati pemilihan umum.

Kepolisian Resort Kota Palembang, adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota Provinsi Sumatera Selatan/ Kota Palembang. Kepolisian Resort Kota Palembang merupakan bagian dari unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu

atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri. Kepolisian Resort Kota Palembang juga selaku satuan kerja merupakan instansi/ lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas berupa menjaga keamanan dan ketertiban wilayah kota Palembang. Guna mencapai tujuan dari kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan, Kepolisian Resort Kota Palembang membutuhkan anggaran yang meliputi Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Menurut Mardiasmo (2009: 61), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pendapat lain yang tidak jauh berbeda mengenai pengertian anggaran juga disampaikan oleh Bastian (2010: 191), Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Maka berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah paket pernyataan mengenai estimasi kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial, tentang penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan pada suatu periode waktu tertentu.

Menurut Mardiasmo (2009:66-67) Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin (*recurrent expenditure*) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.

Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain; belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.

b) Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Anggaran dibagi menjadi dua jenis yaitu anggaran operasional atau anggaran rutin karena sifatnya pengeluaran yang berulang untuk kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan dan anggaran modal yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap.

Pelaksanaan anggaran belanja Kepolisian Resort Kota Palembang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja yang telah disusun setiap tahunnya. Rencana Kerja Kepolisian Resort Kota Palembang (Polresta Palembang), yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/ PMK. 02/ 2013 Tanggal 28 Juni 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja/KL, dan Keputusan Kapolres Palembang Nomor: Kep/ 40/ VI/ 2013 Tanggal 28 Juni 2013 tentang Rencana Kerja Polresta Palembang Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan dalam bentuk program-program.

Program-program tersebut antara lain:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri.
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri.
4. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan.
5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.
6. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
7. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
8. Program Pengembangan Hukum Kepolisian.

Berikut penulis lampirkan PAGU DIPA serta laporan realisasi program-program kegiatan pada Kepolisian Resort Kota Palembang dari tahun 2012-2014.

No	Program	PAGU DIPA 2012	Realisasi		PAGU DIPA 2013	Realisasi		PAGU DIPA 2014	Realisasi	
			Rupiah (Rp)	%		Rupiah (Rp)	%		Rupiah(Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.	101.090.849.000	105.349.765.967	104%	113.356.514.000	109.576.324.376	97%	123.326.095.000	113.363.642.582	92%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri.	212.794.000	212.794.000	100%	29.000.000	28.985.000	99,9%	50.000.000	49.900.000	99%
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri.	7.260.000	7.260.000	100%	6.760.000	6.760.000	100%	5.320.000	5.320.000	100%
4	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan.	220.600.000	220.600.000	100%	409.994.000	409.994.000	100%	617.855.000	616.055.000	99,7%
5	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.	760.600.000	760.600.000	100%	780.820.000	780.820.000	100%	887.503.000	887.503.000	100%
6	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	4.762.435.000	4.716.495.000	100%	4.809.567.090	4.625.676.095	96%	10.213.943.000	9.995.016.108	98%
7	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.	3.304.028.000	3.301.533.800	99,9%	3.434.311.000	3.144.306.750	90%	3.212.646.000	3.212.646.000	100%
8	Program Pengembangan Hukum Kepolisian.	7.000.000	5.000.000	71%	5.000.000	0	0%	2.010.000	2.010.000	100%
Total		110.365.566.000	114.571.048.767	104%	122.857.805.000	118.572.866.271	96%	138.315.372.000	128.132.092.690	93%

Tabel 1.1PAGU DIPA Program-program Kegiatan pada Kepolisian Resort Kota Palembang beserta Realisasi pada tahun 2012 - 2014

Dari penelitian awal yang sudah penulis lakukan, terdapat beberapa latar belakang masalah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai salah satu program di Polresta Palembang, yaitu program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan. Masalah-masalah yang menarik perhatian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Penganggaran program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban mengalami kenaikan secara kontinu dan signifikan.

Temuan pertama yang menarik minat penulis untuk meneliti anggaran dari salah satu program yang ada di Kepolisian Resort Kota Palembang, yang mengalami kenaikan secara Kontinu, yaitu terdapat pada program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan. Pada program tersebut terlihat mengalami kenaikan terus-menerus, kenaikan yang terjadi pada program tersebut sangat signifikan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 dibandingkan dengan program lain nya yang ada di Kepolisian Resort Kota Palembang. Penambahan anggaran pada program tersebut mencapai angka 50% hingga 100% dari tahun ke tahun. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan program lain yang hanya beberapa persen saja. Bahkan ada beberapa kegiatan yang ada pada Kepolisian Resort Kota Palembang mengalami penurunan jumlah anggaran.

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan ini di jalankan oleh satuan Intelejen dan Keamanan. Kegiatan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan, bertujuan untuk memberikan informasi, mendeteksi dan mencegah terjadinya tindak pidana/kerawanan yang bersifat ancaman faktual yang timbul di masyarakat baik di bidang Ideologi, Politik,

Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keamanan Negara diwilayah hukum Polresta Palembang.

Satuan Intelejen dan Keamanan Polresta Palembang juga bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelejen bidang kemanan dan pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), menerima pemberitahuan atau informasi kegiatan-kegiatan yang dapat berpotensi menimbulkan masalah, melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas.
2. Menyenggarakan deteksi dini dan identifikasi terhadap sumber ancaman dan gangguan.
3. Menyenggarakan pengamanan masyarakat dari segala bentuk ancaman dan gangguan
4. Menyenggarakan upaya pengamanan, pengawasan, perlindungan dan penindakan orang asing.
5. Menyenggarakan upaya untuk mencegah tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Menyenggarakan pengamanan dalam bidang Ipoleksusbudkamneg untuk mencegah terjadinya gangguan nyata, ancaman nyata, maupun sekedar potensi gangguan.
7. Mengawasi pengadaan, pemasukan, pembuatan, dan perizinan senjata api.

8. Menyelenggarakan operasi intelejen kepolisian Polresta Palembang, baik secara administratif maupun pelaksanaan operasi baik kendali pusat maupun wilayah.

Untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan diatas, program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan tentunya membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan–kegiatan yang ada, guna mencapai target pelaksanaan program. Pengelolaan anggaran yang baik sangatlah penting, agar segala kegiatan program dapat berjalan dengan baik, tepat guna dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terwujudnya keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Berikut penulis lampirkan tabel data anggaran program Pengembangan Strategi Keaman dan Ketertiban Kewilayah Polresta Palembang:

No	Program	PAGU DIPA 2012	Realisasi		PAGU DIPA 2013	Realisasi		PAGU DIPA 2014	Realisasi	
			Rupiah (Rp)	%		Rupiah (Rp)	%		Rupiah(Rp)	%
1	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan.	220.600.000	220.600.000	100%	409.994.000	409.994.000	100%	617.855.000	616.055.000	99,7%

Tabel 1.2 Data Anggaran Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan Polresta Palembang

Berdasarkan tabel 1.2, data yang ada menunjukkan ada nya kenaikan secara kontinu yang terjadi pada perencanaan anggaran program Pengembangan Strategi

Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan Polresta Palembang dari tahun 2012 hingga 2014 yang menjadi fokus peneliti saat ini. Kenaikan anggaran ini berkisar 50% sampai dengan 100 %, dimana pada tahun 2013 anggaran meningkat sebesar 100% dengan total 409.994.000 rupiah dari tahun sebelumnya yang hanya 220.600.000 rupiah, dan pada tahun 2014 rencana anggaran kembali meningkat sebesar 50% menjadi 616.500.000 rupiah dari tahun sebelumnya yang hanya 409.994.000 rupiah.

2. Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilyahan belum efektif

Pada tabel berikutnya, penulis memberikan data realisasi anggaran yang telah digunakan oleh program untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada tabel tersebut, penulis ingin membandingkan kegiatan-kegiatan program dari tahun-tahun sebelumnya, apakah ada perubahan susunan kegiatan yang menyebabkan ada nya kenaikan anggaran pada program tersebut.

No	Program	PAGU DIPA 2012	Realisasi		PAGU DIPA 2013	Realisasi		PAGU DIPA 2014	Realisasi	
			Total	%		Total	%		Total	%
1	Honor PNPB	19.200.000	19.200.000	100%	20.400.000	20.400.000	100%	34.800.000	33.000.000	95%
2	Pendataan dan Pengawasan pelaku tindak pidana (Polres).	64.880.000	64.880.000	100%	45.940.000	45.940.000	100%	45.850.000	45.850.000	100%
3	Membentuk dan Pembinaan jaringan Informasi Polres	41.730.000	41.730.000	100%	72.915.000	72.915.000	100%	45.480.000	45.480.000	100%
4	Membentuk dan Pembinaan jaringan Informasi Polsek	23.700.000	23.700.000	100%	72.268.000	72.268.000	100%	210.000.000	210.000.000	100%
5	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polres)	48.600.000	48.600.000	100%	49.680.000	49.680.000	100%	12.273.000	12.273.000	100%
6	Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek)	33.300.000	33.300.000	100%	40.770.000	40.770.000	100%	35.100.000	35.100.000	100%
7	Membentuk dan Pembinaan jaringan Informasi	48.070.000	48.070.000	100%	108.021.000	108.021.000	100%	203.000.000	203.000.000	100%
8	Pembinaan Keamanan	-	-	-	-	-	-	6.512.000	6.512.000	100%
Total		220.600.000	220.600.000	100%	409.994.000	409.994.000	100%	617.855.000	616.055.000	99,7%

Tabel 1.3 Data Realisasi Anggaran Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan pada tahun 2012 - 2014

Penulis mengindikasikan adanya temuan kedua pada tabel di atas, dalam hal ini kegiatan pengelolaan dan pentatausahaan anggaran yang dilaksanakan oleh program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan Polresta Palembang ini sudah baik karena target anggaran yang terealisasi sudah 100% dan sebagian kegiatan program sudah mendekati 100% digunakan, tetapi mengingat semua kegiatan pada program tetap sama. Hanya saja ada sedikit perubahan pada tahun 2014, penambahan satu program kegiatan Pembinaan Keamanan yang anggarannya sangat kecil hanya berkisar 1% dari total DIPA tahun 2014 yang menyentuh angka 617.885.000 rupiah tidaklah dapat dikatakan suatu hal yang wajar jika menaikkan anggaran hingga 50% dari tahun sebelumnya, yang DIPA nya sebesar 409.994.000 rupiah.

Temuan ketiga yang menarik minat penulis adalah jika dilihat dari segi kinerja tahun sebelumnya, kinerja program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan sudah menacapai target yang di harapkan dengan anggaran yang ada, dengan kata lain, penulis tertarik untuk meneliti penyebab mengapa dilakukan peningkatan anggaran yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya, padahal dengan anggaran yang ada pada tahun tersebut, kinerja sudah tercapai sesuai dengan target yang diinginkan, bahkan melebihi dari target yang ingin dicapai.

3. Metode pelaksanaan dilakukan secara swakelola berpotensi adanya pemborosan dan tidak tepat guna dalam penggunaan anggaran.

Penulis kembali menemukan temuan bahwa pada Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan menggunakan metode pelaksanaan kegiatan secara Swakelola. Berdasarkan peraturan Kapolri No 10 Tahun 2008 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, metode pelaksanaan kegiatan secara swakelola memiliki arti pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola menggunakan tenaga sendiri atau tenaga dari luar, baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Hal ini yang dapat menyebabkan pemborosan dan tidak tepatnya penggunaan anggaran dalam program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan, karna pihak pengawas dan penanggungjawab keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari satuan Intelkam itu sendiri, namun tetap pada akhirnya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan akan melewati pemeriksaan badan pengawasan Polresta sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polresta Palembang yang berada di bawah Kapolresta Palembang, sebelum akhirnya Laporan keuangan diserahkan kepada BPK sebagai bentuk pengawasan.

Pengelolaan anggaran merupakan kunci keberhasilan efektif dan efisien nya suatu program, hal ini dikarenakan apabila anggaran dikelola dengan bijak dan baik, dengan anggaran yang minim sekalipun bisa menghasilkan tercapainya rencana dan tujuan suatu kegiatan. Beranjak dari paparan yang disampaikan, penulis bertujuan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut

mengenai pokok masalah yang berkenaan dengan *“Pengelolaan Anggaran pada Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan di Kepolisian Resort Kota Palembang Tahun 2014”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan anggaran pada program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan di Kepolisian Resort Kota Palembang tahun 2014?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan anggaran pada program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan di Kepolisian Resort Kota Palembang tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pada program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan di Kepolisian Resort Kota Palembang tahun 2014.
2. Untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan anggaran pada program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan di Kepolisian Resort Kota Palembang tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada pembuat kebijakan mengenai perumusan anggaran pada program di kemudian hari.
- c. Menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah sumber pemikiran bagi ilmu administrasi negara, khususnya dalam bidang konsentrasi administrasi keuangan negara dan fiskal.

2. Manfaat Praktis

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan menghasilkan saran untuk dijadikan masukan sebagai wawasan, informasi untuk kemajuan dan perkembangan pada satuan Intelkam Kepolisian Resort Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisaputro, G. Asri, M. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bohari. 1990. *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Busroh, Abu Daud. 1993. *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Fisip Unsri. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Halim, Abdul & Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Hasan, M. I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996. *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Miles, M.B. dan Huberman .A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press: Jakarta.
- Moleong, I.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Singarimbun, Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Yuwono, Sony dkk. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing.

Dokumen:

Rencana Kegiatan Satuan Intelkam Polresta Palembang

Kertas Kerja RKA/KL Polresta Palembang Tahun Anggaran 2013

Kertas Kerja RKA/KL Polresta Palembang Tahun Anggaran 2014

Laporan Realisasi Anggaran Polresta Palembang Tahun 2012

Laporan Realisasi Anggaran Polresta Palembang Tahun 2013

Laporan Realisasi Anggaran Polresta Palembang Tahun 2014

Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Polresta Palembang Tahun Anggaran 2014

Perwabku Kegiatan Analisis Intelejen Tahun 2014 Satuan Intelkam Polresta Palembang

Perwabku Kegiatan Deteksi dan Lidik Pengamanan Intelejen Satuan Intelkam Polresta Palembang

Pulbaket Terbuka dan Tersamar Satuan Intelkam Polresta Palembang

Jaringan Informasi Satuan Intelkam Polresta Palembang

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/ PMK. 02/ 2013

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/ 06/ PB/ 2009 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Administrasi Peratanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.